

Katalog: 9302020.3373

ISSN 2774-2393

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA SALATIGA
MENURUT PENGELUARAN**

2019-2023

Volume 8, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SALATIGA**

Katalog: 9302020.3373

ISSN 2774-2393

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA SALATIGA
MENURUT PENGELUARAN**

2019-2023

Volume 8, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SALATIGA**

ISSN 2774-2393

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SALATIGA
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023**

Volume 8, 2024

Katalog: 9302020.3373

ISSN: 2774-2393

Nomor Publikasi: 33730.2408

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv+56 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

Sumber Ilustrasi:

canva.com

Dilarang memproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.

TIM PENYUSUN

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SALATIGA
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023
Volume 8, 2024

Pengarah

Ir. Sri Diastuti, M.M

Penanggung Jawab

Ir. Sri Diastuti, M.M

Penyunting

Renaldhi Priyantomo

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Intan Lukiswati

Penata Letak

Intan Lukiswati

KATA PENGANTAR

Buku Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kota Salatiga. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kota Salatiga secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2019-2023 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kota Salatiga sehingga memungkinkan terbitnya buku ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Salatiga, April 2024

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Salatiga



In. Sri Diastuti, M.M.

DAFTAR ISI
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SALATIGA
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023
 Volume 8, 2024

KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
INFOGRAFIS PERTUMBUHAN PER KOMPONEN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	3
B. KEGUNAAN STATISTIK PDRB.....	5
INFOGRAFIS PERTUMBUHAN IMPLISIT.....	7
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)...	9
B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT).....	12
C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP).....	14
D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	17
INFOGRAFIS LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI.....	21
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA SALATIGA TAHUN 2019 – 2023	23
A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA SALATIGA MENURUT PENGELUARAN.....	23
B. PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA.....	28
C. PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT.....	30
D. PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH.	31
E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO.....	32
F. STRUKTUR PERUBAHAN INVENTORI.....	33
G. STRUKTUR NET EKSPOR BARANG DAN JASA.....	34

INFOGRAFIS PDRB PENGELUARAN (ADHB).....	37
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KOTA SALATIGA MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2019-2023.....	39
A. PDRB PER KAPITA.....	39
B. PERBANDINGAN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB.....	40
C. PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI TERHADAP PDRB.....	41
D. NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE).....	42
INFOGRAFIS PDRB PENGELUARAN (ADHK)	45
BAB V PENUTUP.....	46
LAMPIRAN.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	56

<https://salatigakota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Miliar Rp)	24
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Miliar Rp).....	24
Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Salatiga menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Persen).....	25
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	27
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Persen)	28
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2019-2023	29
Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Tahun 2019-2023	30
Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2019-2023	31
Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB Tahun 2019-2023	33
Tabel 10. Struktur Perubahan Inventori Tahun 2019-2023	33
Tabel 11. Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2019-2023	35
Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023.....	40
Tabel 13. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2019-2023	41
Tabel 14. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Terhadap PDRB Tahun 2019-2023	42
Tabel 15. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun 2019-2023.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2019-2023 (Juta Rupiah)	51
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2019-2023 (Juta Rupiah)	52
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2019-2023 (Persen)	53
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2019-2023 (Persen)	54
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) Menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2019-2023 (Persen).....	55

Pertumbuhan per Komponen PDRB Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2023



Konsumsi Rumah Tangga

4,95 %

Konsumsi Pemerintah

2,11 %



*Konsumsi Lembaga
Non Profit*

7,28 %

PM TB

3,35 %



Pertumbuhan
Tahun 2023
5,34 %



BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama setahun, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah tertentu selama setahun.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. JasaKeuangan danAsuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, (2) Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, (3) Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, (5) Perubahan Inventori, dan (6) Ekspor Neto (ekspor dikurangi impor).

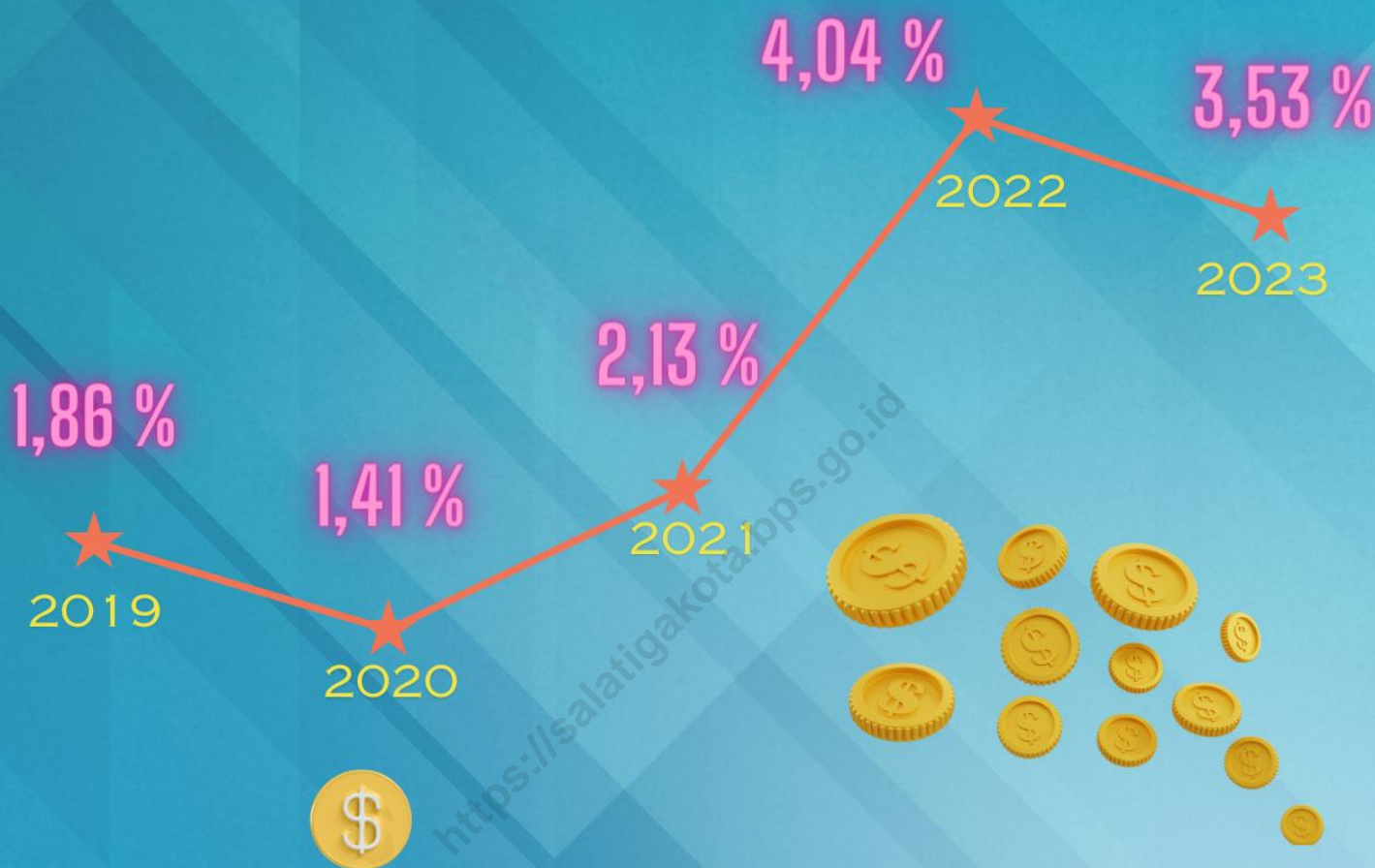
Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

B. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/*daerah/region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

PERTUMBUHAN IMPLISIT PDRB PENGELUARAN KOTA SALATIGA TAHUN 2023



BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel

12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)

- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT adh

Berlaku. PKRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan

atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-

rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

b. Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT adh Berlaku. PKLNPRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKLNPRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Pemerintah sebagai konsumen akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Pemerintah sebagai produsen akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa/Kelurahan) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kota Salatiga mencakup PK-Pemerintah Kota Salatiga; PK-Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dimana Kota Salatiga berada; dan PK-Pemerintah Kelurahan yang ada di wilayah Kota Salatiga.

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kota Salatiga adalah:

- Data realisasi APBN untuk instansi vertikal di Kota Salatiga (KPPN Semarang)
- Data realisasi APBD (BKD)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari KPPN Semarang, BKD Kota Salatiga serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kota adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan. Untuk level kabupaten/kota, PK-P adh berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten/kota itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi instansi vertikal di kabupaten/kota tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kota adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks

Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

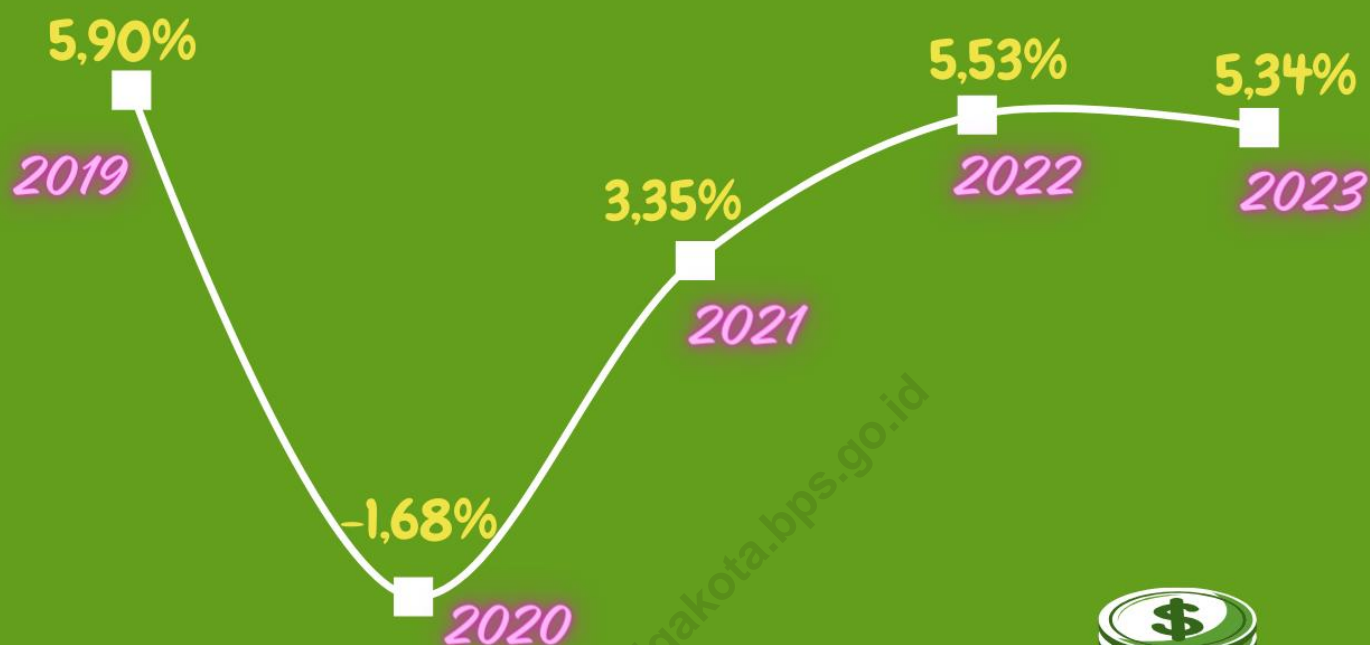
- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Data Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga.
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total

penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "*supply*" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

<https://salatigakota.bps.go.id>

Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2023



BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN

KOTA SALATIGA TAHUN 2019 - 2023

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Salatiga digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPR, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA SALATIGA MENURUT PENGELUARAN

Seiring membaiknya perekonomian nasional dan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2019 cukup stabil. Pada tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda seluruh wilayah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif). Mulai tahun 2021 pandemi Covid-19 masih melanda namun pemulihan ekonomi terus membaik dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022. Pada tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kota Salatiga sedikit mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya.

Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga terkontraksi dengan pertumbuhan sebesar -1,68 persen. Tahun 2021 kondisi perekonomian Kota Salatiga sudah mulai tumbuh tetapi belum maksimal karena pada semester 1 pandemi Covid-19 masih melanda. Memasuki semester 2 tahun 2021 jumlah pasien Covid-19 mulai menurun. Seiring berjalannya vaksinasi Covid-19 Pada tahun 2022, angka kesakitan maupun kematian akibat pandemi Covid-19 menurun drastis bahkan sudah tidak ada lagi. Karena kondisi mulai normal, maka perekonomian pada tahun 2022 pun menunjukkan pertumbuhan yang semakin membaik. Pada tahun 2023 pertumbuhannya mengalami perlambatan menjadi 5,34 persen. Walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan akan tetapi jika dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah pertumbuhannya masih lebih baik. Hal ini terlihat dengan

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 4,98 persen. Perkembangan kondisi ekonomi Kota Salatiga dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 secara berturut-turut yaitu 5,90 persen, -1,68 persen, 3,35 persen, 5,53 persen, dan 5,34 persen. Pertumbuhan pada sektor produksi (*supply side*) diikuti oleh pertumbuhan pada komponen pengeluaran (*demand side*) yang akan diuraikan lebih lanjut dalam publikasi ini.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Miliar Rp)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8 554,92	8 539,32	8 824,97	9 692,94	10 533,34
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	137,40	136,71	143,12	161,69	180,22
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 258,40	1 251,53	1 307,85	1 317,76	1 391,99
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	6 770,53	6 284,92	6 381,30	6 768,22	7 143,45
5 Perubahan Inventori	104,19	126,24	11,26	149,82	168,40
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-3 514,48	-3 066,87	-2 762,91	-2 709,87	-2 644,30
PDRB PENGELUARAN	13 310,96	13 271,84	14 006,59	15 380,56	16 773,09

Nilai PDRB Kota Salatiga atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun kecuali tahun 2020. Pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku disebabkan oleh pertumbuhan volume konsumsi dan perubahan harga.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Miliar Rp)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6 109,79	6 040,14	6 152,12	6 493,80	6 814,96
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,64	85,89	87,15	91,43	98,08
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	788,79	776,65	795,13	795,78	812,57
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 458,90	4 150,35	4 184,73	4 265,78	4 408,81
5 Perubahan Inventori	65,32	122,13	90,51	118,25	124,83
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-1 843,99	-1 671,46	-1 487,65	-1 399,59	-1 340,56
PDRB PENGELUARAN	9 666,45	9 503,71	9 822,00	10 365,44	10 918,69

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2019–2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Salatiga berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 2 di atas. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 kecuali tahun 2020. Pada tahun 2020, penurunan nilai PDRB terjadi karena adanya pandemi Covid-19. Tahun 2023 atau paska pandemi, ekonomi kembali meningkat dengan pengeluaran akhir sebesar 10.918,69 miliar rupiah.

Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Salatiga menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64,27	64,34	63,00	63,02	62,80
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,03	1,03	1,02	1,05	1,07
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,45	9,43	9,31	8,57	8,30
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	50,86	47,36	45,61	44,01	42,59
5 Perubahan Inventori	0,78	0,95	0,80	0,97	1,00
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-26,40	-23,11	-19,74	-17,62	-15,77
PDRB PENGELUARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), Perubahan Inventori dan ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2019 – 2023, produk yang dikonsumsi di wilayah Kota Salatiga sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (lebih dari 60%). Pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi sebesar 64,27 persen. Tahun 2020 kontribusi pengeluaran rumah tangga meningkat menjadi 64,34 persen dan menurun pada 2021 menjadi 63,00 persen. Seiring dengan selesainya pandemi Covid-19, peranan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan menjadi 63,02 persen.

Peranan terbesar berikutnya adalah Komponen PMTB yang sering juga disebut dengan investasi. Menurut Dajin Li (2002) dalam Adhidarma (2015), dalam jangka panjang investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi kontribusi PMTB di Kota Salatiga semakin menurun sejak pandemi Covid-19 berlangsung atau sejak tahun 2020. Meskipun pada tahun 2023 pandemi Covid-19 sudah berakhir, akan tetapi kontribusi PMTB masih mengalami penurunan dibandingkan kontribusi tahun 2022 sebesar 42,59 persen.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah memberikan peranan terbesar berikutnya yang memberikan kontribusi sebesar 9,45 persen pada tahun 2019. Peranan ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 2023 peranan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menjadi 8,30 persen. Penurunan peranan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ini menunjukkan peran komponen rumah tangga dan swasta dalam perekonomian semakin meningkat.

Komponen yang memiliki peran paling kecil yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT. Pada Tahun 2019 komponen ini hanya memberikan peranan sebesar 1,03 persen. Pada tahun 2020, kontribusi LNPRT masih sebesar 1,03 persen. LNPRT pada tahun 2020 bergerak untuk memberi bantuan pada korban pandemi Covid-19. Meskipun pandemi sudah berakhir tetapi kontribusi komponen LNPRT justru mengalami peningkatan menjadi 1,05 persen di tahun 2022 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 1,07 persen.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi

(*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sehingga tidak terpengaruh dengan perubahan harga antar tahun yang dibandingkan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga sebelum pandemi Covid-19 selalu diatas 5,00 persen, akan tetapi setelah adanya pandemi, Kota Salatiga mengalami kontraksi hingga -1,68 persen. Masing-masing pertumbuhan selama lima tahun terakhir adalah sebesar 5,90 persen tahun 2019; -1,68 persen tahun 2020; 3,35 persen tahun 2021; 5,53 persen tahun 2022; dan 5,34 persen tahun 2023.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019–2023 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,02	-1,14	1,85	5,55	4,95
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,89	-1,99	1,47	4,90	7,28
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,89	-1,54	2,38	0,08	2,11
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,14	-6,92	0,83	1,94	3,35
PDRB PENGELUARAN		5,90	-1,68	3,35	5,53	5,34

Dari sisi harga, laju pertumbuhan indeks implisit PDRB menggambarkan ukuran tingkat pertumbuhan perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar wilayah Kota Salatiga).

Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan implisit PDRB Kota Salatiga mengalami flukstuasi. Pada tahun 2019 laju implisit PDRB Kota Salatiga sebesar 1,86 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1,41 persen. Setelah pandemi mulai berakhir, laju implisit PDRB Kota Salatiga kembali merangkak naik menjadi 2,13 persen di tahun 2021, lalu meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 4,04 persen. Kenaikan harga terjadi karena ekonomi masyarakat mulai menggeliat sehingga kebutuhan akan berbagai barang termasuk bahan baku produksi meningkat. Ketika permintaan meningkat maka sesuai hukum permintaan dan penawaran, harga

akan mengalami peningkatan. Berbeda dengan yang terjadi di tahun 2023, laju implisit justru mengalami penurunan menjadi 3,53 persen. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan harga-harga barang dan jasa di tahun 2023 lebih rendah daripada laju pertumbuhan harga tahun sebelumnya (ditunjukkan penurunan angka inflasi tahun 2023).

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2019–2023 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,68	0,97	1,46	4,06	3,55
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,26	1,52	3,17	7,70	3,90
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,75	1,01	1,80	0,94	3,45
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,96	-0,27	0,84	3,91	2,12
PDRB PENGELUARAN	1,86	1,41	2,13	4,04	3,53

B. PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB menurut pengeluaran baik di Kota Salatiga maupun Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa dalam struktur perekonomian Kota Salatiga, sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2019–2023 pengeluaran konsumsi rumah tangga secara umum mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang berdampak mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada lima tahun terakhir menunjukkan pola penurunan. Peranan pada tahun 2019 sebesar 64,27 persen, tahun 2020 sedikit naik menjadi 64,34 persen. Tahun 2021 kontribusi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun

menjadi 63,00 persen. Walaupun Dampak Covid-19 menurunkan daya beli masyarakat, namun komponen pengeluaran konsumsi masih memiliki ketahanan dibandingkan komponen-komponen yang lain.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 44,27 juta rupiah selama setahun, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita tersebut terus meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2023 menjadi 52,95 juta rupiah per kapita per tahun.

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	8 554,92	8 539,32	8 824,97	9 692,94	10 533,34
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	6 109,79	6 040,14	6 152,12	6 493,80	6 814,96
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	64,27	64,34	63,00	63,02	62,80
Rata-rata konsumsi per kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	44 273,00	44 487,19	45 461,16	49 317,65	52 952,65
b. ADHK 2010	31 619,08	31 467,28	31 692,18	33 040,43	34 259,81
Pertumbuhan (% ADHK)					
a. PKRT	5,02	-1,14	1,85	5,55	4,95
b. PKRT Perkapita	4,12	-0,48	0,71	4,25	3,69
Jumlah Penduduk (Jiwa)	193 231	191 950	194 121	196 541	198 920

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan pada tahun 2019 sebesar 5,02 persen. Pandemi Covid-19 yang melanda di tahun 2020, mengakibatkan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan negatif. Penurunan daya beli oleh masyarakat menyebabkan penurunan nilai yang tinggi pada tahun 2020. Tahun 2021 perekonomian masyarakat sudah mulai membaik dengan memiliki pertumbuhan sebesar 1,85 persen. Seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19 pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 turut

meningkat dengan pertumbuhan sebesar 5,55 persen. Kemudian di tahun 2023 pertumbuhan sedikit melambat menjadi 4,95 persen.

Pola pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita seiring dengan pola pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

C. PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu di kisaran 1 (satu) persen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian masih dapat ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Tabel 7 memperlihatkan pertumbuhan konsumsi LNPRT dalam kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2023. Laju pertumbuhan PKLNPRT sebesar 10,89 persen pada tahun 2019 tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pertumbuhan mengalami kontraksi hingga -1,99 persen.

Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Tahun 2019–2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	137,40	136,71	143,12	161,69	180,22
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	87,64	85,89	87,15	91,43	98,08
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	1,03	1,03	1,02	1,05	1,07
Pertumbuhan (%ADHK)	10,89	-1,99	1,47	4,90	7,28

Pertumbuhan PK LNPRT pada tahun 2019 merupakan imbas dari PEMILU Legislatif dan Presiden pada April 2019. Sedangkan kontraksi pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi Covid-19. Pengeluaran konsumsi LNPRT pada tahun 2020 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, salah satunya disebabkan oleh menurunnya konsumsi di lembaga keagamaan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tahun 2021 kondisi konsumsi LNPRT mulai meningkat dengan pertumbuhan sebesar 1,47 persen

dan pada tahun 2022 pertumbuhan PK LNPRT meningkat cukup pesat sebesar 4,90 persen. Kemudian di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 7,28 persen.

D. PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH

Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Konsumsi Akhir Rumah Tangga dan Konsumsi LNPRT merupakan keseluruhan dari konsumsi akhir dalam perekonomian suatu wilayah. Secara total, Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah secara umum menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun Konstan 2010.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 258,40	1 251,53	1 307,85	1 317,76	1 391,99
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	788,79	776,65	795,13	795,78	812,57
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	9,45	9,43	9,31	8,57	8,30
Pertumbuhan (%ADHK)	5,89	-1,54	2,38	0,08	2,11

Pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku 1.258,40 miliar rupiah, kemudian meningkat hingga pada tahun 2023 nilainya mencapai 1.391,99 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang secara umum juga mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB pada periode 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan pola menurun. Pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki peranan sebesar 9,45 persen, dan terus mengalami penurunan. Peranan komponen ini sampai dengan tahun 2023 menjadi 8,30 persen terhadap total PDRB. Penurunan peranan ini tentunya digantikan oleh komponen lain yang dalam kurun waktu

5 (lima) tahun ini memiliki pertumbuhan lebih cepat dibandingkan komponen pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2020 pengeluaran ini menerima dampak dari pandemi Covid-19 sehingga nilai atas dasar harga berlaku maupun konstan (2010) mengalami penurunan. Tahun 2021 konsumsi pemerintah sudah membaik dengan pertumbuhan sebesar 2,38 persen dan pada tahun 2022 melambat dengan pertumbuhan 0,08 persen. Kemudian naik lagi di tahun 2023 menjadi 2,11 persen.

Konsumsi akhir pemerintah secara "riil" menunjukkan peningkatan, baik secara keseluruhan maupun rata-rata per kapita antara tahun 2019-2023. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2019-2023, pertumbuhan konsumsi pemerintah tercepat terjadi pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 5,89 persen dan memiliki pertumbuhan negatif pada tahun 2020 dampak dari pandemi Covid-19 yaitu sebesar -1,54 persen.

E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (*kapital*). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), komponen PMTB juga senantiasa mengalami pertumbuhan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan

2010. Secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami perkembangan yang menggembirakan, sedangkan tahun 2020 seperti halnya komponen yang lain terimbas dari pandemi Covid-19 sehingga memiliki pertumbuhan negatif yang cukup dalam. Pertumbuhan komponen PMTB setiap tahunnya adalah 5,14 persen (2019); -6,92 persen (2020); 0,83 persen (2021); 1,94 persen (2022); dan 3,35 persen (2023).

Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembentukan PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	6 770,53	6 284,92	6 381,30	6 768,22	7 143,45
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	4 458,90	4 150,35	4 184,73	4 265,78	4 408,81
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	50,86	47,36	45,61	44,01	42,59
Pertumbuhan (%ADHK)	5,14	-6,92	0,83	1,94	3,35

F. STRUKTUR PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki dua tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 10. Struktur Perubahan Inventori Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perubahan Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	104,19	126,24	111,26	149,82	168,40
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	65,32	122,13	90,51	118,25	124,83
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	0,78	0,95	0,80	0,97	1,00

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis pertumbuhannya, maka untuk perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam.

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB tahun 2019 (0,78%); 2020 (0,95%); 2021 (0,80%); tahun 2022 (0,97%); dan di tahun 2023 menjadi 1,00%.

G. STRUKTUR NET EKSPOR BARANG DAN JASA

Net ekspor barang dan jasa antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Konsep antar daerah disini adalah antara kabupaten/kota yang terjadi di Indonesia. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Dalam penghitungannya masih dibantu dengan metode *cross-hauling*.

Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar kabupaten/kota menjadikan komponen ini (dalam *series* PDRB ADHK 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang, yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan

inventori, net ekspor antar daerah hasilnya juga dapat memiliki dua angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian juga sebaliknya.

Tabel 11. Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	-3 514,48	-3 066,87	-2 762,91	-2 709,87	-2 644,30
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-1 843,99	-1 671,46	-1 487,65	-1 399,59	-1 340,56
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	-26,40	-23,11	-19,74	-17,62	-15,77

Kontribusi net ekspor antar daerah dalam kurun waktu 2019-2023 selalu bernilai negatif, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Hal ini menunjukkan nilai impor antar daerah lebih besar nilainya daripada nilai ekspor, atau dengan perkataan lain perdagangan antar daerah Kota Salatiga dengan kabupaten/kota lain selalu mengalami *defisit* seperti terlihat pada tabel 11. Peningkatan pemenuhan barang dan jasa dari produksi wilayah Kota Salatiga serta peningkatan ekspor produk barang dan jasa akan memacu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga dan dapat mengurangi nilai defisit dari net ekspor barang dan jasa.

PDRB ADHB PENGELUARAN KOTA SALATIGA TAHUN 2019 -2023 (MILIAR RUPIAH)

2019



13.310,96

2020



13.271,84

2021



14.006,59

2022



15.380,56

2023



16.773,09



BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KOTA SALATIGA MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2019-2023

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

A. PDRB PER KAPITA

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Pertumbuhan perekonomian yang tinggi belum menjamin kemakmuran yang tinggi bagi masyarakatnya karena pengaruh beberapa faktor lain seperti jumlah penduduk, pendidikan, infrastruktur, dll. Tingkat pertumbuhan PDRB per kapita dapat digunakan sebagai indikator perkembangan kemakmuran suatu daerah walaupun dengan asumsi semua masyarakat memiliki andil yang sama dalam pembentukan PDRB tersebut bukan hanya masyarakat tertentu saja (menghilangkan pengaruh tingkat pengeluaran rumah tangga yang tinggi, menengah ataupun rendah).

PDRB per kapita Kota Salatiga menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir kecuali pada tahun 2020. Penurunan nilai dan pertumbuhan PDRB per kapita tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang melumpuhkan berbagai sektor ekonomi. Kontraksi yang terjadi pada tahun 2020 mencapai – 1,03 persen. Pada semester 2 tahun 2021, kasus Covid-19 mengalami penurunan bahkan mencapai nol kasus sejak November 2021. Menurunnya kasus Covid-19 mampu membangunkan perekonomian dengan pertumbuhan per kapita sebesar 2,19 persen pada tahun 2021. Kasus Covid-19 benar-benar

sudah mencapai nol kasus sepanjang tahun 2022, hal tersebut mendorong perekonomian menjadi normal seperti sebelum pandemi dengan pertumbuhan sebesar 4,23 persen dan di tahun 2023 sebesar 4,08 persen. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Salatiga rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Tahun 2019–2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
ADHB	13 310,96	13 271,84	14 006,59	15 380,56	16 773,09
ADHK 2010	9 666,45	9 503,71	9 822,00	10 365,44	10 918,69
Pertumbuhan PDRB (%)	5,90	-1,68	3,35	5,53	5,34
Nilai PDRB Per Kapita (Juta Rp)					
ADHB	68,89	69,14	72,17	78,26	84,32
ADHK 2010	50,03	49,51	50,60	52,74	54,89
Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	4,99	-1,03	2,19	4,23	4,08
Jumlah Penduduk (Jiwa)	193 231	191 950	194 121	196 541	198 920
Pertumbuhan jumlah penduduk	0,87	-0,66	1,13	1,27	1,21

Pertumbuhan PDRB per kapita setiap tahunnya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan tingkat kemakmuran dari penduduk yang lebih tinggi pada setiap tahunnya, hanya saja di tahun 2020 dampak pandemi menyebabkan pertumbuhan PDRB per kapita berada di bawah pertumbuhan penduduk.

B. PERBANDINGAN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Salatiga digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Tabel 13. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PKRT-ADHB (Miliar Rp)	8 554,92	8 539,32	8 824,97	9 692,94	10 533,34
PMTB-ADHB (Miliar Rp)	6 770,53	6 284,92	6 381,30	6 768,22	7 143,45
Perbandingan PKRT dan PMTB	1,26	1,36	1,38	1,43	1,47

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir sebesar 1,38 kali. Hal ini dapat diartikan penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 1,38 kali lebih besar dibanding untuk PMTB. Kurun waktu tahun 2019-2023 rasio ini terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan pandemi Covid-19 lebih berdampak kepada pengeluaran PMTB dibandingkan dengan Konsumsi Rumah Tangga.

C. PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Sekitar 72,17 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kota Salatiga digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir dalam hal ini rumah tangga, pemerintah dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga pada tahun 2023. Selama lima tahun terakhir persentase produk yang digunakan untuk konsumsi akhir cenderung mengalami penurunan dari 74,76 persen tahun 2019, 74,80 persen tahun 2020; 73,33 persen tahun 2021; 72,64 persen tahun 2022; dan menjadi 72,17 persen di tahun 2023. Penurunan persentase konsumsi akhir terhadap PDRB diikuti dengan peningkatan inventori dan net ekspor.

Tabel 14. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Terhadap PDRB Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi ADHB (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	8 554,92	8 539,32	8 824,97	9 692,94	10 533,34
b. LNPRT	137,40	136,71	143,12	161,69	180,22
c. Pemerintahan	1 258,40	1 251,53	1 307,85	1 317,76	1 391,99
Jumlah	9 950,72	9 927,56	10 272,46	11 172,39	12 105,55
PDRB ADHB (Miliar Rp)	13 310,96	13 271,84	14 006,59	15 380,56	16 773,09
Proporsi Pengeluaran Konsumsi terhadap PDRB (%)	74,76	74,80	73,33	72,64	72,17

D. NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai "**Ekspor Neto**", apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi *surplus*, dan sebaliknya yang terjadi adalah *defisit*. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran uang masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran uang keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Tabel 15. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHB (Miliar Rp)	13 310,96	13 271,84	14 006,59	15 380,56	16 773,09
Net Ekspor Barang dan Jasa (Miliar Rp)	-3 514,48	-3 066,87	-2 762,91	-2 709,87	-2 644,30
Proporsi Net Ekspor (%)	-26,40	-23,11	-19,74	-17,62	-15,77

Selama periode 2019-2023, posisi perdagangan barang dan jasa Kota Salatiga dengan luar negeri dan antar kabupaten/kota/provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kota Salatiga selalu dalam posisi defisit atau dengan kata lain impor lebih besar dari ekspor. Meskipun dalam posisi defisit akan tetapi proporsi net

ekspor terhadap PDRB terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor lebih besar dari impor, meskipun nilai ekspor lebih tinggi dari impor. Jika peningkatan pertumbuhan ekspor terus berlanjut akan menjadi hal yang positif bagi Kota Salatiga karena pertumbuhan ekspor dapat memberikan dampak domino bagi perekonomian Kota Salatiga.

<https://salatigakota.bps.go.id>

PDRB ADHK PENGELUARAN KOTA SALATIGA TAHUN 2019 -2023 (MILIAR RUPIAH)

2019



9.666,45

2020



9.503,71

2021



9.822,00

2022



10.365,44

2023



10.918,69



BAB V

PENUTUP

1. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Nominal PDRB Kota Salatiga tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai 16,77 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang sudah mereda. Dari nilai tersebut sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai 72,17 persen dimana 62,80 persennya adalah konsumsi rumah tangga. Dengan peranan konsumsi rumah tangga yang sangat dominan. Tidak dapat dipungkiri bahwa komponen ini adalah penopang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga. Tahun 2023 konsumsi rumah tangga memiliki pertumbuhan sebesar 4,95 persen.
3. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Kota Salatiga dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Proporsi PMTB ini pada tahun 2023 sebesar 42,59 persen dengan pertumbuhan sebesar 3,35 persen.
4. Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Salatiga memiliki nilai negatif sehingga setiap tahun terjadi defisit neraca perdagangan. Meskipun masih mengalami defisit tetapi nilainya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2023 nilai Net Ekspor mengalami peningkatan karena nilai ekspor barang dan jasa yang meningkat lebih besar dibandingkan nilai impornya. Peningkatan produksi barang dan jasa dari wilayah Kota Salatiga akan meningkatkan neraca perdagangan sehingga memperkecil defisit.

LAMPIRAN

<https://salatigakota.bps.go.id>

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2019-2023 (Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8 554 915,93	8 539 315,57	8 824 965,44	9 692 940,85	10 533 340,84
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	137 398,92	136 711,49	143 116,94	161 685,33	180 220,81
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 258 400,21	1 251 531,67	1 304 381,85	1 317 763,29	1 391 990,19
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	6 770 532,33	6 284 915,05	6 390 058,45	6 768 220,67	7 143 445,46
5 Perubahan Inventori	104 190,95	126 239,64	111 886,40	149 819,45	168 397,50
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-3 514 482,39	-3 066 872,06	-2 765 503,45	-2 709 871,51	-2 644 303,18
PDRB Pengeluaran	13 310 955,95	13 271 841,36	14 008 905,63	15 380 558,08	16 773 091,62

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2019-2023 (Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6 109 785,99	6 040 145,34	6 152 117,44	6 493 798,55	6 814 962,16
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	87 637,68	85 891,94	87 154,55	91 425,02	98 080,76
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	788 787,71	776 649,8	795 134,07	795 780,12	812 571,08
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 458 900,46	4 150 351,37	4 184 730,22	4 265 775,98	4 408 813,01
5 Perubahan Inventori	65 321,12	122 131,36	90 509,71	118 250,94	124 825,69
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-1 843 986,65	-1 671 458,32	-1 487 650,31	-1 399 592,53	-1 340 563,92
PDRB PENGELUARAN	9 666 446,31	9 503 711,49	9 821 995,68	10 365 438,08	10 918 688,78

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2019-2023 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64,27	64,34	63,00	63,02	62,80
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,03	1,03	1,02	1,05	1,07
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,45	9,43	9,31	8,57	8,30
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	50,86	47,36	45,61	44,01	42,59
5 Perubahan Inventori	0,78	0,95	0,80	0,97	1,00
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-26,40	-23,11	-19,74	-17,62	-15,77
PDRB PENGELUARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2019-2023 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,02	-1,14	1,85	5,55	4,95
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,89	-1,99	1,47	4,90	7,28
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,89	-1,54	2,38	0,08	2,11
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,14	-6,92	0,83	1,94	3,35
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB PENGELUARAN	5,90	-1,68	3,35	5,53	5,34

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) Menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2019-2023 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,68	0,97	1,46	4,06	3,55
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,26	1,52	3,17	7,70	3,90
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,75	1,01	1,80	0,94	3,45
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,96	-0,27	0,84	3,91	2,12
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB PENGELUARAN	1,86	1,41	2,13	4,04	3,53

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Salatiga. 2021. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Menurut Pengeluaran 2016-2020*. Salatiga: Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.
- BPS Kota Salatiga. 2022. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Menurut Pengeluaran 2017-2021*. Salatiga: Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.
- BPS Kota Salatiga. 2023. *Kota Salatiga Dalam Angka*. Salatiga: Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.
- BPS Kota Salatiga. 2024. *Kota Salatiga Dalam Angka*. Salatiga: Badan Pusat Statistik Kota Salatiga
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2021. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran 2016-2020*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2022. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran 2017-2021*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2023. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran 2018-2022*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2024. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran 2019-2023*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Li, Dajin. 2002. *Is the AK model still alive? The Long-run relation between growth and investment re-examined*. The Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d'Économique, Vol. 35, No. 1.
- Regional.kompas.com. 2021. *21 Kelurahan di Salatiga Nol Kasus Covid-19, Tersisa 4 Pasien Jalani Isoman*. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/11/134342678/21-kelurahan-di-salatiga-nol-kasus-covid-19-tersisa-4-pasien-jalani-isoman> diakses pada 24 Februari 2023.

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA
MENCERDASKAN BANGSA

<https://salatigakota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SALATIGA**

Jl. Hasanudin Km 01, Dukuh, Sidomukti, Salatiga

Telp: (0298) 326319

Homepage: <https://salatigakota.bps.go.id> Email: bps3373@bps.go.id

ISSN 2774-2393



9 772774 239009